



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WANDHA PARAMITHA DHUANGGA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
3. NHK : 737725

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	160.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m2/174 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 160.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	340.000.000
1. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2024, HADIAH Rp. 340.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	49.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.444.583
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	553.944.583

III. HUTANG **Rp.** **9.500.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **544.444.583**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIAL
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3. NHK : 699740

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	220.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	114.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.250.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	340.750.000
III. HUTANG	Rp.	241.442.999
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	99.307.001

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUWANDI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3. NHK : 744696

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.800.000.000**

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KUANTAN SINGINGI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 407 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 3.438 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 424 m2/218 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **17.500.000**

1. MOTOR, HONDA ND 125 KIRANA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **10.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **4.187.815**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.831.687.815**

III. HUTANG **Rp.** **98.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.733.687.815**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHUZAIFAH
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3. NHK : 964195

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	730.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 380.000.000		
3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	80.000.000
1. MOBIL, SUZUKI SUV Tahun 2008, HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	42.441.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	95.000.000
Sub Total	Rp.	947.441.000

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	947.441.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTA DINATA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3. NHK : 746629

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	420.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 1.425 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	159.500.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2011, WARISAN Rp. 80.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA ETIOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.181.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	350.000.000
Sub Total	Rp.	972.681.000

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	972.681.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANDINA ANGGRENI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
3. NHK : 1014770

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	130.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.499.144
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	140.499.144
III. HUTANG	Rp.	233.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-92.500.856

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAISAL BHAKTI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3. NHK : 629792

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.375.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/81 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
3. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
4. Tanah Seluas 535 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **335.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU FEROZA JEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU GRAND MAX PICK UP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. LAINNYA, KRISBOW MESIN GENSET 8500 WATT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



6. MOTOR, HONDA SCOOPY SPEDEDA MOTOR SOLO Tahun
2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	226.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.844.303
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.939.844.303
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.939.844.303

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Juni 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARVINALDE AMENDA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3. NHK : 744526

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 817.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 287 m2/149 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
2. Tanah Seluas 283 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
3. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 207.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA AFX12U21C08M/T / SPD MTR SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 G M/T MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 113.029.423

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.137.529.423

III. HUTANG Rp. 224.539.632

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 912.989.791



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 April 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALISMAN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
3. NHK : 445953

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	464.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000		
2. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
3. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	184.850.000
1. MOTOR, HANDA MEGA PRO - Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.950.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.699.395
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	700.449.395



III. HUTANG

Rp. 527.417.235

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 173.032.160

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN SETIAWAN
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 461997

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **612.126.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 252.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 190.126.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **129.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **5.300.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **495.149.181****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **1.241.575.181****III. HUTANG** **Rp.** **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **1.241.575.181**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU PURNOMO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 1005796

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA
KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.805.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 100 Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
25.805.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 128.456.095

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 464.261.095

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 464.261.095

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDIK SANTOSO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 456717

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **873.000.000**

1. Tanah Seluas 403 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/90 m2 di KAB / KOTA
KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 1.699 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000
4. Tanah Seluas 1.600 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI
Rp. 38.000.000
6. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA JEMBER, WARISAN Rp.
110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **24.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000



2. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 16.000.000

Sub Total Rp. 927.200.000

III. HUTANG Rp. 81.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 846.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.